



Dinas
Perempuan
dan Anak
Provinsi
Jawa Tengah



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dinas Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan HidayahNya, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 hingga Triwulan II dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Renja Perubahan ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen satu tahunan bagi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, oleh karena itu, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk menyusun program yang selaras dengan dokumen yang lebih tinggi dan merumuskan program dan kegiatan yang progresif untuk menjawab permasalahan yang ada.

Penyusunan Renja Perubahan disusun secara partisipatif dan melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan, sehingga Renja ini dapat selesai disusun dan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, semua komponen unit kerja internal harus berkomitmen untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja program kegiatan serta tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Renja Perubahan Dinas tahun 2025.

Semoga apa yang kita harapkan kedepan terkait urusan PPPA dan Dalduk KB, dapat bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan perempuan dan anak pada khususnya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19660517 199008 2 001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Perubahan Renja PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Semarang, 22 September 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERNYATAAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	9
2.2. Faktor Keberhasilan dan Kendala Pencapaian Kinerja PPPA dan Dalduk KB	16
2.3. Implikasi Capaian Program Renja Perangkat Daerah.....	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	19
3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	22
BAB IV PENUTUP.....	76

DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Perubahan	2
-----	---	---

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I 2025 Provinsi Jawa Tengah.....	10
3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025.....	20
3.2	Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 pasca terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025 – 2030, menjadi salah satu landasan untuk merubah program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) murni tahun 2025 sebagai upaya mendukung penjabaran visi dan misi Kepala Daerah baru serta program prioritas daerah yang sudah ditentukan.

RKPD Perubahan Tahun 2025 merupakan penjabaran tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, namun juga sekaligus masih mempertimbangkan dan mengakomodir beberapa kebijakan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026. Arah Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 adalah **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur bagi Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat”**. Arah Pembangunan ini guna mendukung Visi Gubernur terpilih yaitu **“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”**

Perubahan RKPD harus menjadi pedoman seluruh perangkat daerah untuk menyusun dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dalam rangka implementasi 136 program prioritas/intervensi/aksi dan taktis Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Penataan kembali kebijakan perencanaan dan penganggaran diperlukan agar dapat lebih optimal sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan program astacita.

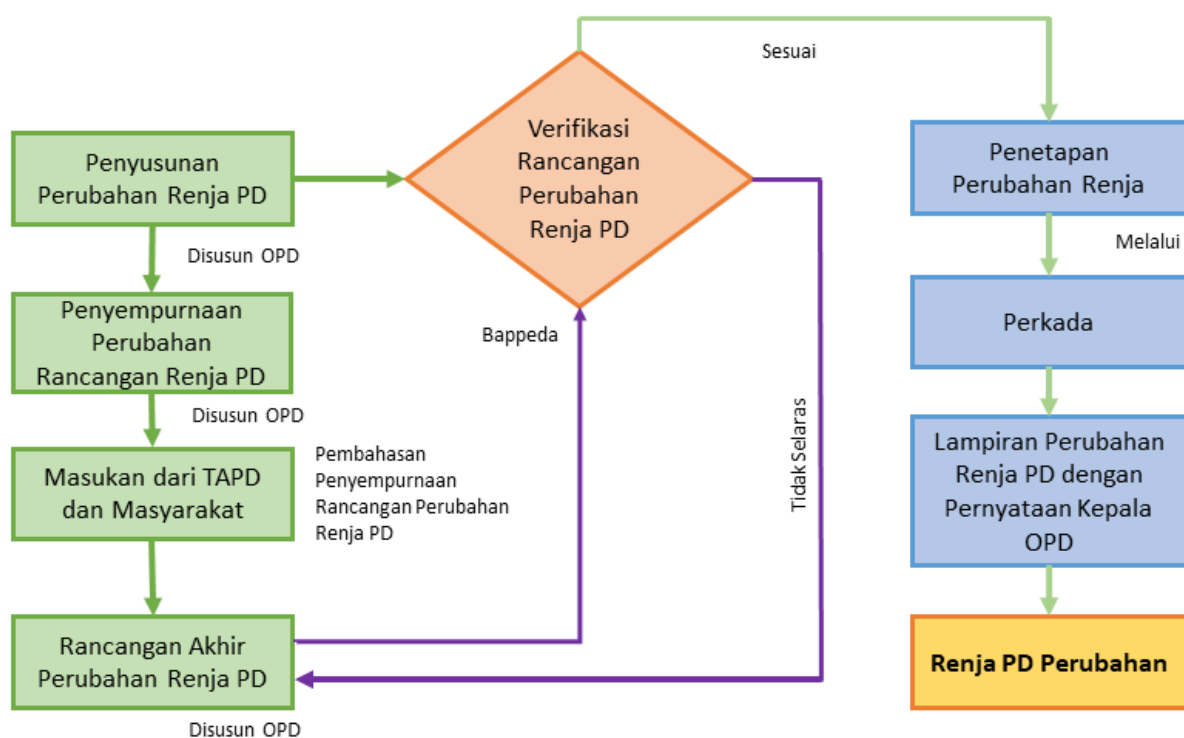
Oleh karena itu, Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan Tahun 2025 selain harus sinergis pada RPJMD baru, juga harus mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan triwulan I tahun 2025 serta usulan program dan kegiatan dari masyarakat/stakeholder terkait.

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah mendukung pada sasaran ke-3 yaitu, **meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter**, dimana perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas diimplementasikan secara inklusif, artinya memperhatikan kesetaraan dan pemberdayaan gender, serta kelompok rentan (miskin, difabel,

ibu bayi, balita, lansia, dan remaja) sebagai salah satu upaya mendorong ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas untuk melahirkan generasi emas. Perwujudan tersebut tentunya selaras dengan Tujuan Jawa Tengah yang tertuang pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, yang di dalamnya terdapat pengukuran Indeks Modal Manusia. Sumber daya manusia Jawa Tengah yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif diharapkan harus mampu menjawab dinamika dan tuntutan jaman demi terwujudnya keluarga berkualitas yang berkeadilan dan setara, dengan lokus intervensi kegiatan pada Kecamatan Berdaya yang dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan.

Proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, Desk usulan perubahan Rancangan Renja baik pagu maupun pentargetan, penyempurnaan perubahan Rancangan Renja baik pagu maupun pentargetan, Evaluasi hasil capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dan Penetapan target indikator dan anggaran perubahan, serta penyusunan rancangan akhir perubahan renja perangkat daerah sebagaimana digambarkan pada bagan berikut :

Bagan 1. Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah



Penyusunan perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa Tengah mengacu pada kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang dituangkan di dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026 dan memperhatikan Rancangan RPJMD 2025 – 2030. Selain hal tersebut, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 harus disusun mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dituangkan di dalam Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
16. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
17. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 – 2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan

- Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (6/85/2017) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-2/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
 23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-54/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
 24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (4-56/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (5-93/2022) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJMD Tahun 2025 -2045;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Prov. Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
31. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025 -2029;
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);
33. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2045;
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026;
35. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 21);
37. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

38. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
39. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : S/000.7.2.5/10/2025 tanggal 18 April 2025 tentang Panduan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
40. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/000.7.5/243/2025 tanggal 25 Juli 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah memberikan arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berkenaan.
2. Sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama triwulan I tahun 2025.
3. Sebagai alat untuk menyelaraskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama satu tahun dengan dokumen di atasnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 serta perkiraan capaian akhir tahun 2025, Pencapaian target Renja tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 – 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target, melebihi target, maupun yang belum memenuhi target, analisis laporan kinerja pelayanan perangkat daerah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi maupaun yang belum memenuhi, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, implikasi yang timbul terhadap capaian program, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi uraian ringkas tentang indikator tujuan dan sasaran perubahan Renja PD, rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah, serta lokasi sasaran pencapaian Renja Perangkat Daerah dan pegu indikatif perubahan tahun 2025.

BAB IV Penutup

Berisi hal-hal yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Keberhasilan Kinerja dapat dilihat dari realisasi capaian program dan kegiatan yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, capaian pelaksanaan program dan kegiatan harus dievaluasi secara berkala dan menyeluruh. Capaian Kinerja Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I 2025
Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir 2024 – 2026 s/d Tahun 2025
							Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	%	70	80		65	80	123,07	80
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	%	15	10,37		10	10,37	103,7	10,37
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	%	80	78		75	78	104	78
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	%	50	28,57		22	31,42	142,82	31,42
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100		100	100	100	100
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	%	58	44,44		52	44,44	85,46	44,44

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir 2024 – 2026 s/d Tahun 2025
							Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	100		100	100	100	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelp	14	11		12	5	41,6	5
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	25,71	22,86		20	22,85	114,25	22,85
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	%	100	100		100	100	100	100
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	100		100	100	100	100
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	%	88,57	100		82,86	82,86	100	82,86
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	Kab/kota	4	15		4	0	0	0
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelp	20	20		20	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir 2024 – 2026 s/d Tahun 2025
							Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio korban kekerasan terhadap anak	Per 100.000	11,7	11,15		11,8	1,7	694,12	1,7
		Persentase korban kekerasan anak terlayani	%	100	100		100	100	100	100
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	%	37,14	34,29		34,2	34,29	100,2	34,29
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	100		100	100	100	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelp	15	15		15	0	0	15
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	%	62	75		57	83,33	146,19	83,33
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	Kab/ Kota	22	27		20	30	150	30
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam	Dok	1	1		1	1	100	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir 2024 – 2026 s/d Tahun 2025
							Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmetneed KB	%	9,8	7,79		9,9	6,75	146,67	6,75
		Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	%	66,4	69,46		65,99	68,93	104,46	68,93
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	%	31,5	27,10		31	27,49	88,67	27,49
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	%	20	10,66		15	18,1	120,66	18,1
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	36	36,45		32	30,68	95,88	30,68
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	ASFR (<i>Age Specific Fertility Rate</i>)	Angka	18,5	13,7		18,7	13,7	136,49	13,7
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	30	66,65		30	0	0	0
	Non Urusan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	90	90		90	10	11,11	1
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	70	45		50	10	20	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir 2024 - 2026 s/d Tahun 2025
							Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	35	25,71		30	25,71	85,7	1
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	15	11,4		12	11,4	95	4
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	60	40		50	10	20	3
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dok	1	1		1	0	0	1
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dok	1	1		1	0	0	1
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	90		90	10	11,11	1
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	90		90	10	11,11	4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	90		90	10	11,11	3
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	90		90	10	11,11	1
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	5		5	0	0	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir 2024 – 2026 s/d Tahun 2025
							Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	1		1	0	0	1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1		1	0	0	4
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1		1	0	0	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1		4	2	50	1
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	5		3	2	66,67	1

2.2. Faktor Keberhasilan dan Kendala Pencapaian Kinerja PPPA dan Dalduk KB

2.2.1 Faktor Keberhasilan

- a. Program gerakan Jo Kawin Bocah secara masif untuk mendukung penurunan angka perkawinan usia anak serta merupakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
- b. Kerjasama lintas sektor unsur Pentahelix dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik melalui perjanjian kerjasama maupun kolaborasi kegiatan;
- c. Peningkatan kapasitas tenaga dan SDM Penyedia layanan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mendorong kualitas layanan dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
- d. Kerjasama lintas sektor untuk optimalisasi pemberdayaan ekonomi perempuan dengan mendorong pembiayaan non APBD seperti Baznas dan CSR lainnya;
- e. Kader KB ditingkat Desa mendukung peran dan fungsi PLKB meningkatkan KIE KB di Desa;
- f. Mitra lintas sektor untuk mendukung penggerakan KB dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa;
- g. Komitmen Kabupaten/Kota untuk menyusun GDPK 5 pilar.

2.2.2 Kendala dan Hambatan

- a. Semakin banyaknya kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO);
- b. Masih banyaknya kasus kekerasan dilingkungan pendidikan atau dipondok pesantren;
- c. Sistem Perlindungan Anak berbasis masyarakat belum optimal.
- d. Terkendalanya akses pemasaran perempuan yang sudah dilatih ketrampilan ekonomi;
- e. Masih banyaknya Kabupaten/Kota yang belum membentuk UPTD PPA dalam rangka optimalisasi penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak;
- f. Pemanfaatan Data Pilah Gender dan Anak belum optimal dalam mendorong kebijakan responsif perempuan dan anak di daerah;
- g. Kurangnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat karena keterbatasan jumlah tenaga penyuluh KB dilapangan, terutama pada masyarakat didaerah terpencil maupun perbatasan;

- h. Belum optimalnya peran kader Tribina (BKB, BKR dan BKL) dalam mendorong ketahanan keluarga;
- i. Kurangnya optimalisasi kampung keluarga berkualitas yang sudah dibentuk.

2.3. Implikasi Capaian Program Renja Perangkat Daerah

a. Implikasi Regulasi dan Kebijakan

Keselarasan Renja Perubahan dengan dokumen perencanaan nasional dan RKPD Perubahan menjadi faktor krusial dalam penentuan capaian. Target seperti penurunan perkawinan anak, peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Perlindungan Anak (IPA), serta Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Pembangunan Keluarga, TFR, MKJP dan target kinerja lainnya menuntut OPD untuk merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan bermanfaat langsung kepada masyarakat.

b. Implikasi Anggaran dan Pendanaan

Capaian program Renja Perubahan akan dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Adanya efisiensi anggaran dapat dimaksimalkan dengan kegiatan kolaboratif, CSR dan dukungan mitra kerja lain seperti Baznas, Unicef dan lembaga lain yang terkait.

c. Implikasi Data dan Sistem Informasi

Pemenuhan target capaian membutuhkan data yang akurat, terpilah menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, dan wilayah. Integrasi dengan kebijakan **Satu Data Indonesia dan Satu Data Jawa Tengah** mendorong OPD memiliki sistem informasi yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses. Lemahnya penyediaan data terpilah yang berkualitas akan berimplikasi pada rendahnya kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi program. Sehingga diperlukan upaya membangun dan memperluas **database terpilah** (gender, usia, disabilitas, wilayah) yang terintegrasi serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi (Simfoni PPA, SIGA BKKBN) dan daerah (e-Kekerasan) sebagai basis monitoring capaian.

d. Implikasi Jangka Panjang

Keberhasilan capaian Renja perubahan OPD berimplikasi luas pada peningkatan kualitas pembangunan manusia di Jawa Tengah, ditandai dengan turunnya angka kemiskinan perempuan dan anak, meningkatnya kualitas SDM, serta terwujudnya ketahanan keluarga yang

berkelanjutan. Dengan demikian, capaian program PPPA dan Dalduk KB menjadi penopang utama keberhasilan pembangunan daerah sekaligus pencapaian SDGs.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai renstra tahun 2024 – 2026 dan RPJMD tahun 2025 - 2029 antara lain: 1) peningkatan kesetaraan gender; 2) pemenuhan hak anak; 3) perlindungan perempuan dan anak; 4) peningkatan kesertaan keluarga berencana dan KIE KB; 5) peningkatan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga; 6) peningkatan layanan korban kekerasan perempuan dan anak. Tujuan renja dirumuskan untuk :

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi Perempuan dan mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan;
2. Menurunkan kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
3. Mendorong terpenuhinya hak-hak anak secara komprehensif;
4. Meningkatkan perlindungan Perempuan dan anak;
5. Mendorong pembangunan keluarga berkualitas;
6. Mendorong pertumbuhan penduduk secara seimbang;
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.

Guna mendukung pencapaian tujuan renja tersebut, sasaran difokuskan pada :

1. Meningkatnya peran perempuan dalam semua sektor pembangunan;
2. Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara optimal dan komprehensif;
3. Meningkatnya pemenuhan hak anak;
4. Meningkatnya perlindungan khusus anak;
5. Terkendalinya jumlah penduduk;
6. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah;
8. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi OPD, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 telah melalui tahap evaluasi dan difokuskan untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

guna mendukung visi dan misi pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Salah satu di dalamnya terdapat Program Intervensi yaitu Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center). Program Intervensi tersebut direalisasikan melalui Program Aksi yaitu dengan mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas (RPPA) di setiap Kecamatan.

Tujuan dan sasaran dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.
Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025	
					Renja PD	P-Renja PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan		Pengeluaran Perempuan perKapita	Ribu rupiah	9.950	10.900
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Perempuan Yang dilatih Pemberdayaan Ekonomi Menjadi Wirausaha	%	35	40
2	Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	Per 100.000	5,50	5,50
		Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4,2	4,2
3	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	67	65

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025	
					Renja PD	P-Renja PD
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	73	61
		Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	76	78,5
4	Meningkatkan Keluarga Berkualitas		Persentase Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%	2	2
		Terkendalinya jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,12	2,1
		Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Peningkatan kelompok UPPKA yang menjadi wirausaha	%	100	100
5	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74	80
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,80	2,80
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88	88

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 3.2
Rumusan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 (Perubahan)
Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatkan Keluarga Berkualitas											965.000.000	1.165.000.000	1.087.611.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%	2	2	2						
	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										965.000.000	1.165.000.000	1.087.611.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha	%	100	100	100	320.000.000	320.000.000	495.661.000			
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								320.000.000	320.000.000	495.661.000			
						Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	32	32	32	320.000.000	320.000.000	495.661.000			
		2.14.04.1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							100.000.000	100.000.000	60.520.000			
						ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Angka	18,7	18,7	17,7	100.000.000	100.000.000	60.520.000			SEKSI KELUARGA SEJAHTERA
		2.14.04.1.01.0008			Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB						40.000.000	40.000.000	22.332.000			
						Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Kelompok	1	1	1	40.000.000	40.000.000	22.332.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.14.04.1.01.0020			Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja						60.000.000	60.000.000	38.188.000			
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Kabupaten/Kota	3	3	3	60.000.000	60.000.000	38.188.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA
		2.14.04.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							220.000.000	220.000.000	435.141.000			
						Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	30	30	30	220.000.000	220.000.000	435.141.000			SEKSI KELUARGA SEJAHTERA
		2.14.04.1.02.0006			Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas						40.000.000	40.000.000	22.748.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten/Kota	2	2	2	40.000.000	40.000.000	22.748.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA
		2.14.04.1.02.0007			Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota						40.000.000	40.000.000	28.768.000			
						Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	1	1	1	40.000.000	40.000.000	28.768.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA
		2.14.04.1.02.0008			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga						140.000.000	140.000.000	383.625.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kelompok	2	2	2	140.000.000	140.000.000	383.625.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA
						Persentase keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota	%	34	34	34	-	-	-			
		2.14.04.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							-	-	-			
						Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga	%	30	30	30	-	-	-			SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.14.04.1.02.0008			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga						-	-	-			
					Jumlah mitra dan organisasi masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pembangunan ketahanan keluarga		Kelompok	0	0	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
	Terkendalinya Jumlah Penduduk										965.000.000	1.165.000.000	1.087.611.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Angka Kelahiran Total (TFR)		Angka	2,12	2,12	2,1	645.000.000	845.000.000	591.950.000			
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								195.000.000	195.000.000	112.524.000			
					Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)		%	57	57	57	-	-	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.14.02.1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi							-	-	-			
						Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	1	1	1	-	-	-			SEKSI DATA DAN INFORMASI
		2.14.02.1.02.0008			Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						-	-	-			
						Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	0	0	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI DATA DAN INFORMASI
						Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	%	57	57	57	195.000.000	195.000.000	112.524.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.14.02.1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							190.000.000	190.000.000	108.884.000			
						Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	Kabupaten/Kota	20	20	20	190.000.000	190.000.000	108.884.000			SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.02.1.01.0002			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi						35.000.000	35.000.000	17.912.000			
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	2	2	2	35.000.000	35.000.000	17.912.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.02.1.01.0007			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat						50.000.000	50.000.000	25.355.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen	2	2	2	50.000.000	50.000.000	25.355.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.02.1.01.0015			Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain						15.000.000	15.000.000	11.918.000			
						Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Kabupaten/Kota	1	1	1	15.000.000	15.000.000	11.918.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.02.1.01.0017			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						90.000.000	90.000.000	53.699.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	1	1	2	90.000.000	90.000.000	53.699.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.02.1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi							5.000.000	5.000.000	3.640.000			
						Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	1	1	1	5.000.000	5.000.000	3.640.000			SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.02.1.02.0008			Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						5.000.000	5.000.000	3.640.000			
						Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	Dokumen	1	1	1	5.000.000	5.000.000	3.640.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								450.000.000	650.000.000	479.426.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	%	65,99	65,99	69,47	380.000.000	580.000.000	442.530.000			
		2.14.03.1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							380.000.000	580.000.000	442.530.000			
						Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	%	31	31	27,5	380.000.000	580.000.000	442.530.000			SEKSI KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.1.01.0007		Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal							180.000.000	180.000.000	103.065.000			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	20	20	10	180.000.000	180.000.000	103.065.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.1.01.0012				Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja					200.000.000	400.000.000	339.465.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Kabupaten/Kota	7	7	7	200.000.000	400.000.000	339.465.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI KELUARGA BERENCANA
						Unmetneed	%	9,9	9,9	7,78	70.000.000	70.000.000	36.896.000			
		2.14.03.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							70.000.000	70.000.000	36.896.000			
						Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	%	15	15	10	70.000.000	70.000.000	36.896.000			SEKSI KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.1.02.0002			Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						70.000.000	70.000.000	36.896.000			
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kelompok	3	3	2	70.000.000	70.000.000	36.896.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI KELUARGA BERENCANA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan											1.060.000.000	1.060.000.000	1.023.351.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Pengeluaran perempuan per kapita	Ribu Rupiah	9950	9950	10900						
	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan										1.060.000.000	1.060.000.000	1.023.351.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	35	35	40	1.060.000.000	1.060.000.000	1.023.351.000			
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								1.000.000.000	1.000.000.000	990.325.000			
						Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	%	65	65	80	1.000.000.000	1.000.000.000	990.325.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.02.1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							80.000.000	80.000.000	42.968.000			
						Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	%	10	10	11	80.000.000	80.000.000	42.968.000			SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.02.1.01.0005			Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi						-	-	-			
						Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Dokumen	1	1	0	-	-	-			SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.02.1.01.0006			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi						25.000.000	25.000.000	11.190.000			
						Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Laporan	2	2	2	25.000.000	25.000.000	11.190.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.02.1.01.0007			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi						30.000.000	30.000.000	15.230.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Dokumen	50	50	50	30.000.000	30.000.000	15.230.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.02.1.01.0008			Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi						25.000.000	25.000.000	16.548.000			
						Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Orang	25	25	25	25.000.000	25.000.000	16.548.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.02.1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi							920.000.000	920.000.000	947.357.000			
						Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	%	75	75	75	920.000.000	920.000.000	947.357.000			SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.02.1.02.0003			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi						880.000.000	880.000.000	913.798.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang	1280	1280	1330	880.000.000	880.000.000	913.798.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.02.1.02.0004			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi						40.000.000	40.000.000	33.559.000			
						Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kelompok	3	3	3	40.000.000	40.000.000	33.559.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								60.000.000	60.000.000	33.026.000			
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	20	20	20	60.000.000	60.000.000	33.026.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.04.1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							60.000.000	60.000.000	33.026.000			
						Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	%	100	100	100	60.000.000	60.000.000	33.026.000			SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.04.1.01.0001			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						60.000.000	60.000.000	33.026.000			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	OPD	10	10	6	60.000.000	60.000.000	33.026.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								-	-	-			
						Persentase keterisian indikator oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi Sistem Informasi	%	30	30	30	-	-	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Gender dan Anak (SIGA) provinsi										
		2.08.05.1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							-	-	-			
						Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	12	12	12	-	-	-			SEKSI DATA DAN INFORMASI
		2.08.05.1.01.0001			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi						-	-	-			
						Jumlah ketersediaan dokumen data gender dan anak	Dokumen	0	0	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI DATA DAN INFORMASI
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah											16.646.242.000	16.748.468.000	16.239.919.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74	74	80						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah										16.646.242.000	16.748.468.000	16.239.919.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88	88	88	16.421.242.000	16.523.468.000	16.098.724.000			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								16.271.242.000	16.373.468.000	16.009.134.000			
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	90	90	90	608.960.000	608.960.000	535.029.000			
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							255.960.000	255.960.000	182.139.000			
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	90	90	255.960.000	255.960.000	182.139.000			
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						255.960.000	255.960.000	182.139.000			
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	1	1	255.960.000	255.960.000	182.139.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							57.500.000	57.500.000	57.818.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	90	90	57.500.000	57.500.000	57.818.000			
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000	1.000.000	640.000			
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4	3	1.000.000	1.000.000	640.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000	5.000.000	32.880.000			
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1	3	5.000.000	5.000.000	32.880.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						1.500.000	1.500.000	3.598.000			
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	1	1.500.000	1.500.000	3.598.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000	50.000.000	20.700.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	1	1	50.000.000	50.000.000	20.700.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.500.000	1.500.000	1.500.000			
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	5	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						1.500.000	1.500.000	1.500.000			
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	1	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							280.000.000	280.000.000	254.796.000			
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1	1	280.000.000	280.000.000	254.796.000			
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000	50.000.000	39.537.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1	1	50.000.000	50.000.000	39.537.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						230.000.000	230.000.000	215.259.000			
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1	1	230.000.000	230.000.000	215.259.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							14.000.000	14.000.000	38.776.000			
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit			3	14.000.000	14.000.000	38.776.000			
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000	10.000.000	13.671.000			
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	3	10.000.000	10.000.000	13.671.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						-	-	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	1	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.000.000	2.000.000	15.000.000			
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	1	2.000.000	2.000.000	15.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.000.000	2.000.000	10.105.000			
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	1	2.000.000	2.000.000	10.105.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	90	90	90	15.662.282.000	15.764.508.000	15.474.105.000			
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							12.926.902.000	13.029.128.000	12.973.780.000			
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	1	1	12.926.902.000	13.029.128.000	12.973.780.000			SUB BAGIAN KEUANGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.508.502.000	12.610.728.000	12.610.728.000			
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	60	60	61	12.508.502.000	12.610.728.000	12.610.728.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						368.400.000	368.400.000	333.200.000			
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1	1	368.400.000	368.400.000	333.200.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						30.000.000	30.000.000	19.990.000			
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	1	1	30.000.000	30.000.000	19.990.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						20.000.000	20.000.000	9.862.000			
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	1	1	20.000.000	20.000.000	9.862.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							67.000.000	67.000.000	61.862.000			
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang	Dokumen	1	1	1	67.000.000	67.000.000	61.862.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						milik daerah pada perangkat daerah										
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						-	-	-			
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						65.000.000	65.000.000	60.000.000			
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	1	65.000.000	65.000.000	60.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.000.000	2.000.000	1.862.000			
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	1	1	2.000.000	2.000.000	1.862.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						-	-	-			
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							35.000.000	35.000.000	37.546.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	90	90	35.000.000	35.000.000	37.546.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						-	-	-			
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0	0	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						-	-	-			
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	1	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						-	-	-			
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	1	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						-	-	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0	0	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						35.000.000	35.000.000	37.546.000			
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	20	20	30	35.000.000	35.000.000	37.546.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						-	-	-			
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	0	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							587.500.000	587.500.000	450.375.000			
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	90	90	587.500.000	587.500.000	450.375.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000	3.000.000	8.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	3.000.000	3.000.000	8.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000	100.000.000	63.106.000			
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	2	3	100.000.000	100.000.000	63.106.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000	10.000.000	10.000.000			
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor						80.000.000	80.000.000	123.633.000			
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	12	80.000.000	80.000.000	123.633.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						5.000.000	5.000.000	7.704.000			
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	1	5.000.000	5.000.000	7.704.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						55.500.000	55.500.000	25.277.000			
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	1	1	55.500.000	55.500.000	25.277.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu						-	-	-			
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	0	0	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						270.000.000	270.000.000	135.000.000			
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	1	1	270.000.000	270.000.000	135.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.000.000	4.000.000	7.000.000			
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	1	1	4.000.000	4.000.000	7.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						60.000.000	60.000.000	70.655.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	1	60.000.000	60.000.000	70.655.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							12.000.000	12.000.000	12.000.000			
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	5	2	12.000.000	12.000.000	12.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						-	-	-			
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0	0	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						10.000.000	10.000.000	10.000.000			
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-	-	-			
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	1	0	-	-	-			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						-	-	-			
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	1	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.000.000	2.000.000	2.000.000			
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	1	2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.742.880.000	1.742.880.000	1.556.930.000			
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1	1	1.742.880.000	1.742.880.000	1.556.930.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						-	-	-			
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						500.000.000	500.000.000	308.200.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1	1	500.000.000	500.000.000	308.200.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						-	-	-			
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	1	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.242.880.000	1.242.880.000	1.248.730.000			
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1	1	1.242.880.000	1.242.880.000	1.248.730.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							291.000.000	291.000.000	381.612.000			
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	4	4	291.000.000	291.000.000	381.612.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						160.000.000	160.000.000	172.115.000			
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	24	24	20	160.000.000	160.000.000	172.115.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						1.000.000	1.000.000	700.000			
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0	0	1	1.000.000	1.000.000	700.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						80.000.000	80.000.000	127.671.000			
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2	2	80.000.000	80.000.000	127.671.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000	50.000.000	81.126.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	3	6	50.000.000	50.000.000	81.126.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								150.000.000	150.000.000	89.590.000			
						Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	30	30	30	150.000.000	150.000.000	89.590.000			
		2.08.05.1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							150.000.000	150.000.000	89.590.000			
						Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	12	12	12	150.000.000	150.000.000	89.590.000			SUB BAGIAN PROGRAM
		2.08.05.1.01.0001			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi						150.000.000	150.000.000	89.590.000			
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	6	6	3	150.000.000	150.000.000	89.590.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi	SUB BAGIAN PROGRAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah										16.646.242.000	16.748.468.000	16.239.919.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,8	2,8	2,8	225.000.000	225.000.000	141.195.000			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								225.000.000	225.000.000	141.195.000			
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	50	50	50	225.000.000	225.000.000	141.195.000			
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							225.000.000	225.000.000	141.195.000			
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	50	50	50	225.000.000	225.000.000	141.195.000			SUB BAGIAN PROGRAM
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						110.000.000	110.000.000	63.733.000			
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	1	1	110.000.000	110.000.000	63.733.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN PROGRAM
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						115.000.000	115.000.000	77.462.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	1	3	115.000.000	115.000.000	77.462.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SUB BAGIAN PROGRAM
Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak											513.510.000	713.840.000	1.015.087.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	67	67	65						
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak										513.510.000	713.840.000	1.015.087.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	73	73	61	260.000.000	260.000.000	657.088.000			
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								75.000.000	75.000.000	60.657.000			
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	20	20	22,86	75.000.000	75.000.000	60.657.000			
		2.08.04.1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							75.000.000	75.000.000	60.657.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	100	100	75.000.000	75.000.000	60.657.000			SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
		2.08.04.1.03.0001			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000	75.000.000	60.657.000			
						Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	20	20	20	75.000.000	75.000.000	60.657.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								185.000.000	185.000.000	596.431.000			
						Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	%	82,86	82,86	82,86	185.000.000	185.000.000	596.431.000			
		2.08.06.1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							150.000.000	150.000.000	575.685.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	Kabupaten/Kota	4	4	4	150.000.000	150.000.000	575.685.000			SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
		2.08.06.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi						60.000.000	60.000.000	531.519.000			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	2	2	60.000.000	60.000.000	531.519.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
		2.08.06.1.01.0003			Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						90.000.000	90.000.000	44.166.000			
						Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	OPD	10	10	10	90.000.000	90.000.000	44.166.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
		2.08.06.1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							35.000.000	35.000.000	20.746.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelompok	20	20	20	35.000.000	35.000.000	20.746.000			SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
		2.08.06.1.02.0005			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						20.000.000	20.000.000	10.542.000			
						Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	1	1	2	20.000.000	20.000.000	10.542.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
		2.08.06.1.02.0006			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak						15.000.000	15.000.000	10.204.000			
						Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	1	1	1	15.000.000	15.000.000	10.204.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
						Persentase keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	%	100	100	100	-	-	-			
		2.08.06.1.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						-	-	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelompok	20	20	20	-	-	-			SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
		2.08.06.1.02.0005			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						-	-	-			
						Jumlah lembaga mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak	Kelompok	0	0	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
		2.08.06.1.02.0006			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak						-	-	-			
						Jumlah peserta KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi	Orang	0	0	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak										513.510.000	713.840.000	1.015.087.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	76	76	78,5	253.510.000	453.840.000	357.999.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								253.510.000	453.840.000	357.999.000			
						Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring	%				-	-	-			
		2.08.07.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							-	-	-			
						Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	Kelompok	15	15	15	-	-	-			SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
		2.08.07.1.03.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						-	-	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Kegiatan	0	0	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
						Persentase korban kekerasan anak terlayani	%	100	100	100	70.000.000	185.070.000	154.299.000			
		2.08.07.1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							70.000.000	185.070.000	154.299.000			
						Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	70.000.000	185.070.000	154.299.000			
		2.08.07.1.02.0005			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						20.000.000	70.000.000	39.229.000			
						Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan) / Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Orang	50	50	50	20.000.000	70.000.000	39.229.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.07.1.02.0006			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi						50.000.000	115.070.000	115.070.000			
						Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Orang	35	35	35	50.000.000	115.070.000	115.070.000			
						Rasio korban kekerasan terhadap anak	per 100.000 penduduk	11,8	11,8	11,8	183.510.000	268.770.000	203.700.000			
		2.08.07.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							50.000.000	100.750.000	76.142.000			
						Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	%	34,2	34,2	34,2	50.000.000	100.750.000	76.142.000			SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi						20.000.000	70.750.000	60.826.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	20.000.000	70.750.000	60.826.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.01.0005			Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi						30.000.000	30.000.000	15.316.000			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	30.000.000	30.000.000	15.316.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							-	-	-			
						Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	-	-	-			SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.02.0005			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						-	-	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.02.0006			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi						-	-	-			
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							133.510.000	168.020.000	127.558.000			
						Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	15	15	15	133.510.000	168.020.000	127.558.000			SEKSI PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.07.1.03.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						2.500.000	2.500.000	2.050.000			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	2.500.000	2.500.000	2.050.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.03.0004			Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi						2.500.000	2.500.000	2.050.000			
						Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	1	1	2.500.000	2.500.000	2.050.000			SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.03.0006			Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi						15.000.000	15.000.000	7.808.000			
						Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	15.000.000	15.000.000	7.808.000			SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.03.0007			Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi						15.000.000	15.000.000	14.230.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	Orang	20	20	20	15.000.000	15.000.000	14.230.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.07.1.03.0008			Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan						98.510.000	133.020.000	101.420.000			
						Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	Orang	25	25	110	98.510.000	133.020.000	101.420.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan											977.550.000	1.177.880.000	1.445.555.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	5,5	5,5	5,5						
	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan										977.550.000	1.177.880.000	1.445.555.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4,2	4,2	4,2	977.550.000	1.177.880.000	1.445.555.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								977.550.000	1.177.880.000	1.445.555.000			
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	%	22	22	31,42	927.510.000	1.012.770.000	1.301.251.000			
		2.08.03.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							80.000.000	130.750.000	92.968.000			
						Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	%	52	52	52	80.000.000	130.750.000	92.968.000			SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		2.08.03.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi						30.000.000	80.750.000	66.790.000			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	4	30.000.000	80.750.000	66.790.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.03.1.01.0002			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						50.000.000	50.000.000	26.178.000			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	OPD	1	1	1	50.000.000	50.000.000	26.178.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		2.08.03.1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							-	-	-			
						Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	-	-	-			SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		2.08.03.1.02.0001			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						-	-	-			
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	1	1	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.03.1.02.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi						-	-	-			
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	1	1	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		2.08.03.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							847.510.000	882.020.000	1.208.283.000			
						Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	12	12	12	847.510.000	882.020.000	1.208.283.000			SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		2.08.03.1.03.0001			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi						50.000.000	50.000.000	27.926.000			
						Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Dokumen	1	1	1	50.000.000	50.000.000	27.926.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Kewenangan Provinsi										
		2.08.03.1.03.0002			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi						34.510.000	69.020.000	593.201.000			
					Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang		10	10	10	34.510.000	69.020.000	593.201.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		2.08.03.1.03.0003			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi						20.000.000	15.000.000	7.971.000			
					Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang		25	25	25	20.000.000	15.000.000	7.971.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.03.1.03.0004			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						743.000.000	748.000.000	579.185.000			
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	2	743.000.000	748.000.000	579.185.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
						Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring	%	22	22	22	-	-	-			
		2.08.03.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							-	-	-			
						Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi	Kelompok	12	12	12	-	-	-			SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.08.03.1.03.0004			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						-	-	-			
						Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota	Orang	0	0	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT
						Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100	100	50.040.000	165.110.000	144.304.000			
		2.08.03.1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							50.040.000	165.110.000	144.304.000			
						Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	50.040.000	165.110.000	144.304.000			
		2.08.03.1.02.0001			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000	50.040.000	29.234.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	Tahun 2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu (Rp)			Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	50	50	50	20.000.000	50.040.000	29.234.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
		2.08.03.1.02.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi						30.040.000	115.070.000	115.070.000			
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	5	5	39	30.040.000	115.070.000	115.070.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, sekaligus menyesuaikan dengan Rancangan RPJMD tahun 2025 – 2029 dan RKPD tahun 2026 dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program dan kegiatan jangka pendek serta alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Beberapa permasalahan apabila ketersediaan anggaran (APBD dan APBN) tidak sesuai dengan kebutuhan, maka strategi yang digunakan antara lain: 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Perubahan Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran dalam RPD; 2) mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPD dan RPJMD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

Harapannya, keberhasilan pembangunan jangka pendek untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya SDM Berdaya Saing dan Berkarakter”.

Beberapa kaidah pelaksanaan Renja perubahan 2025 yang perlu diatur antara lain:

1. Seluruh unit kerja internal harus mendukung pencapaian target-target dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dengan optimal;
2. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu satu tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 – 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jawa Tengah tahun 2024 – 2026 serta RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan RKPD Perubahan Tahun 2025.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja Perubahan tahun 2025, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan program maupun kegiatan Perubahan Renja secara berkala;
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Tindak lanjut disusunnya Rencana Kerja perubahan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Mendorong implementasi Program Prioritas Kementerian PPPA dan Kemendukbangga;
2. Mendukung Visi Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Melakukan upaya optimal terhadap peningkatan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan melalui Serat Kartini utamanya di Kecamatan Berdaya serta peningkatan pelembagaan PUG;
4. Advokasi dan asistensi terhadap pemenuhan hak anak di Kabupaten/Kota dan peningkatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha sesuai indikator KLA;
5. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kelompok rentan perempuan, anak dan keluarga secara berkelanjutan dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat serta stakeholder di Kabupaten/Kota melalui optimalisasi Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di Kecamatan Berdaya;
6. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan UPTD PPA korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama jejaring mitra kerja dan Kabupaten/Kota, mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung upaya tersebut serta mengoptimalkan fungsi Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan.
7. Melakukan upaya optimal guna meningkatkan kesertaan keluarga berencana melalui optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dukungan layanan KB, penggerakan dan peningkatan peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha;
8. Mendorong implementasi Grand Desain Pembangunan Keluarga (GDPK) 5 pilar di daerah sebagai upaya mendorong peningkatan pengendalian kuantitas

penduduk dan kualitas penduduk serta pembangunan kualitas keluarga yang responsif gender dan anak;

9. Perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan keterlibatan keluarga dan peran aktif kelompok Tribina serta pemberdayaan UPPKA secara efektif dan berkelanjutan.